



***“SOSIALISASI PROGRAM INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT IRRIGATION PROJECT ”***

Yogyakarta, 30 September 2015



- Penyaluran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ke Pemda
 - K/L
 - Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
 - Pinjaman diteruspinjamkan
 - Pinjaman dihibahkan
 - Hibah diterushibahkan
 - Hibah dipinjamkan
- Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project
 - Status dalam dokumen perencanaan
 - Status dalam penganggaran

Penyaluran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ke Pemerintah Daerah

□ Kementerian/Lembaga

- Dana Dekonsentrasi

Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di Daerah.

- Tugas Pembantuan

Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas Pembantuan.


❑ Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011

- **Pasal 7:**
Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:
 - Membiayai defisit APBN;
 - Membiayai kegiatan prioritas K/L;
 - Mengelola portofolio utang;
 - ***Diteruspinjamkan kepada Pemda;***
 - Diteruspinjamkan kepada BUMN;
 - ***Dihibahkan kepada Pemda.***
- **Pasal 57 ayat (1):**
Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat:
Diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemda sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012

- **Pasal 4 ayat 3:**
Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN meliputi:
 - Penerimaan dalam negeri;
 - ***Hibah luar negeri;***
 - ***Pinjaman luar negeri.***
- **Pasal 5:**
Hibah kepada Pemda yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

- 
- **Pinjaman Luar Negeri diteruspinjaman kepada Pemda**
 - **Pinjaman Luar Negeri dihibahkan kepada Pemda**
 - **Hibah Luar Negeri diterushibahkan kepada Pemda**
 - **Hibah Luar Negeri dipinjamkan kepada Pemda.**

Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan vs Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

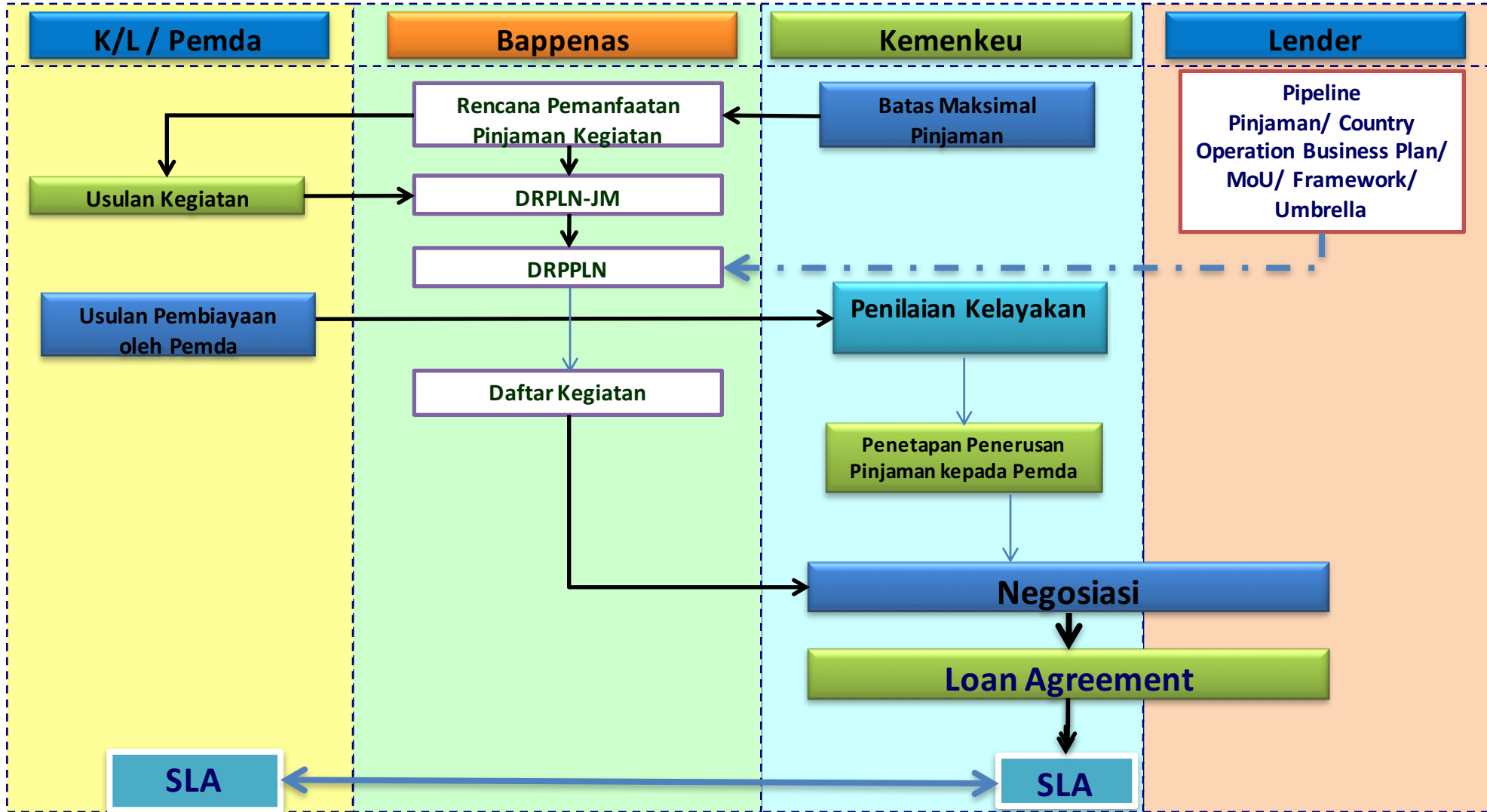
Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

- **Bagian dari APBN**
- **Masuk dalam Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga**
- **Mendanai pelaksanaan kewenangan dan tupoksi Kementerian/Lembaga**
- **Tidak masuk dalam APBD.**
- **Barang yang diperoleh menjadi barang milik negara.**
- **Dapat dihibahkan kepada Pemda**

Penerusan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

- **Bagian dari APBN dan APBD**
- **Bagian Anggaran BUN (Bendahara Umum Negara)**
- **Mendanai pelaksanaan kewenangan Pemda**
- **Menjadi asset Pemda**

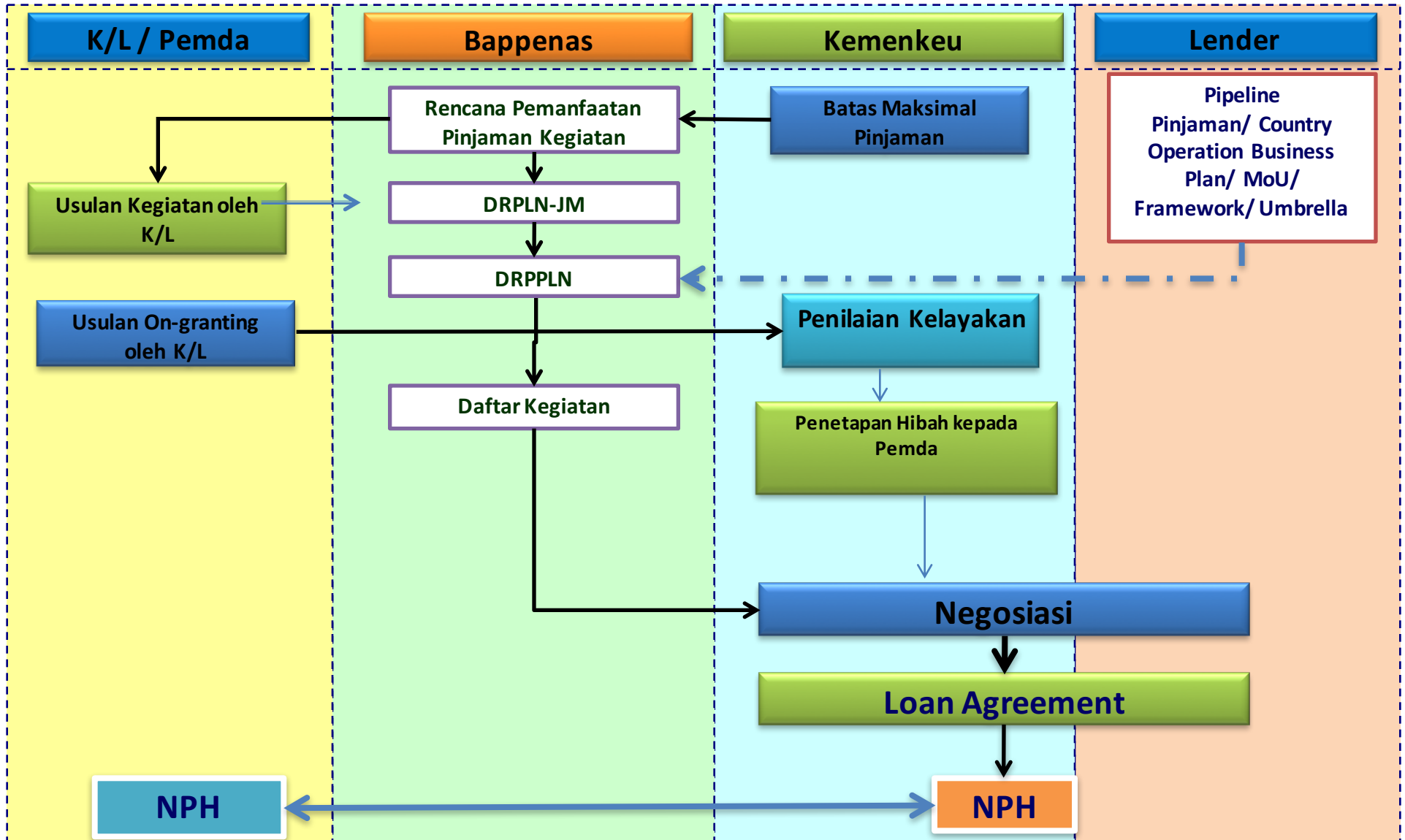
A. Pinjaman Luar Negeri Diteruskanpinjamkan kepada Pemda



Pinjaman Luar Negeri Diteruspinjamkan kepada Pemda

- **Gubernur/Bupati/Walikota** menyampaikan usulan pembiayaan melalui penerusan pinjaman luar negeri kepada Menteri Keuangan.
- **Usulan pembiayaan:**
 - Memiliki sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5;
 - Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- **Dokumen pendukung antara lain:**
 - Persetujuan DPRD;
 - Pertimbangan Menteri Dalam Negeri;
 - Study kelayakan kegiatan;
 - Perhitungan rasion kemampuan keuangan Daerah;
 - Laporan keuangan selama 3 tahun terakhir dengan opini WTP;
 - Surat pernyataan kesediaan untuk dilakukan pemotongan DAU/DBH dalam rangka pembayaran tunggakan.
 - Surat Kuasa Pemotongan DAU/DBH dari Gubernur/Bupati/Walikota kepada Dirjen Perimbangan Keuangan
- **Tingkat bunga Penerusan Pinjaman**
 - a. **Apabila penerusan pinjaman dilakukan dalam mata uang sesuai Loan Agreement, maka tingkat bunga SLA (penerusan pinjaman) dikenakan sebesar : tingkat bunga Loan Agreement + 0,34%**
 - b. **Apabila penerusan pinjaman dilakukan dengan mata uang rupiah, maka tingkat suku bunga dikenakan sebesar tingkat suku bunga SUN tenor 20 tahun.**

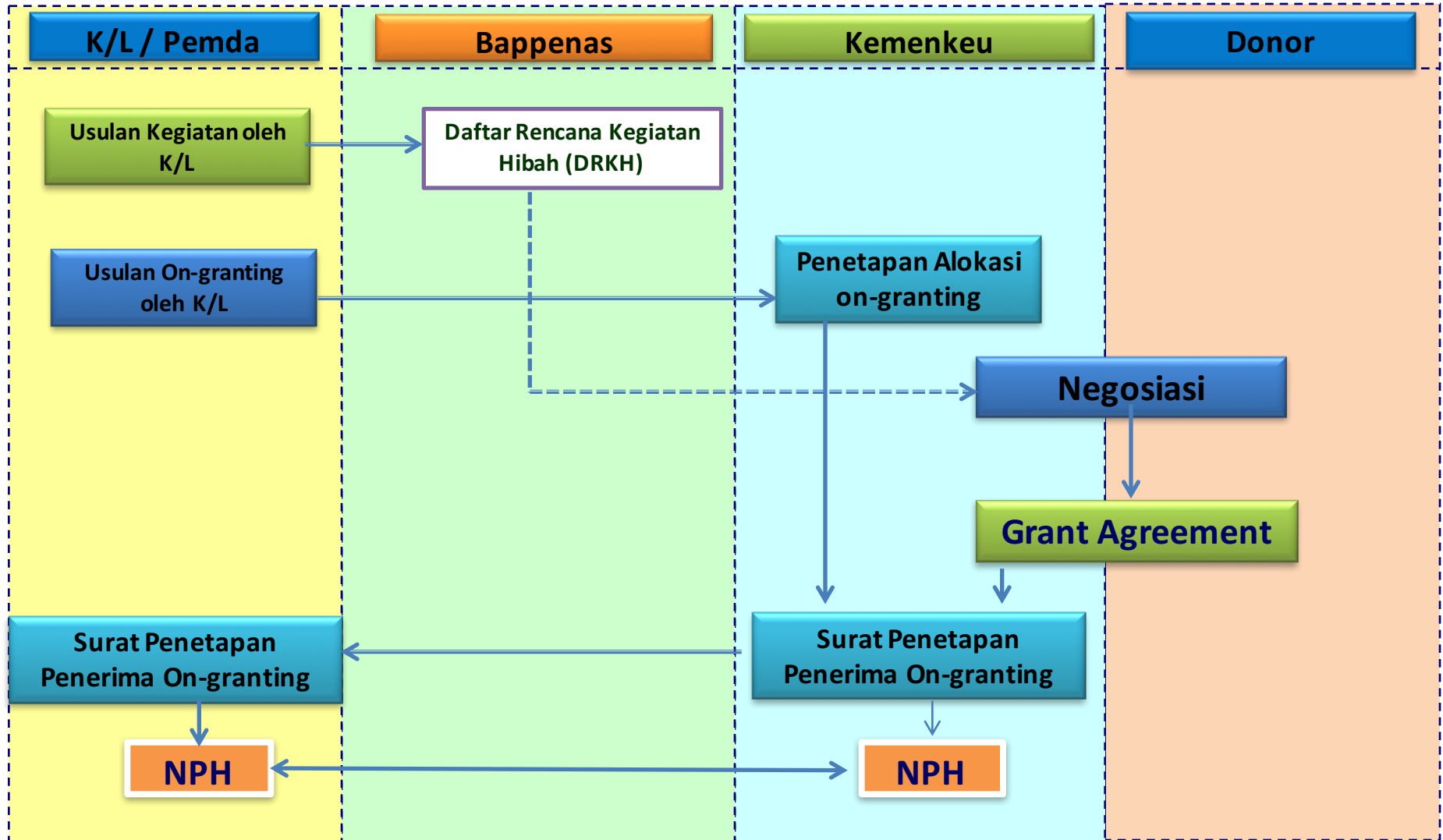
B. Pinjaman Luar Negeri Dihibahkan kepada Pemda



Pinjaman Luar Negeri D hibahkan kepada Pemda

- **Menteri/pimpinan lembaga berdasarkan Blue Book** mengusulkan pembiayaan kegiatan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan:
 - Daftar nama Pemda yang akan menerima hibah;
 - Besaran hibah untuk masing-masing Pemda;
- Pengusulan Pemda sebagai penerima hibah mempertimbangkan:
 - Kapasitas fiskal daerah;
 - Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh K/L
- **Usulan pembiayaan:**
 - Usulan pembiayaan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional.

C. Hibah Luar Negeri Diterushibahkan kepada Pemda



Hibah Luar Negeri Diterushibahkan kepada Pemda

- **Menteri/pimpinan lembaga berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan Hibah** mengusulkan pembiayaan kegiatan kepada Menteri Keuangan:
 - Daftar nama Pemda yang akan menerima hibah;
 - Besaran hibah untuk masing-masing Pemda;
 - Pengusulan Pemda sebagai penerima hibah mempertimbangkan:
 - Kapasitas fiskal daerah;
 - Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh K/L
 - Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah
- **Usulan pembiayaan:**

Usulan pembiayaan digunakan untuk melaksanakan:

 - kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - Kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional;
 - Kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.

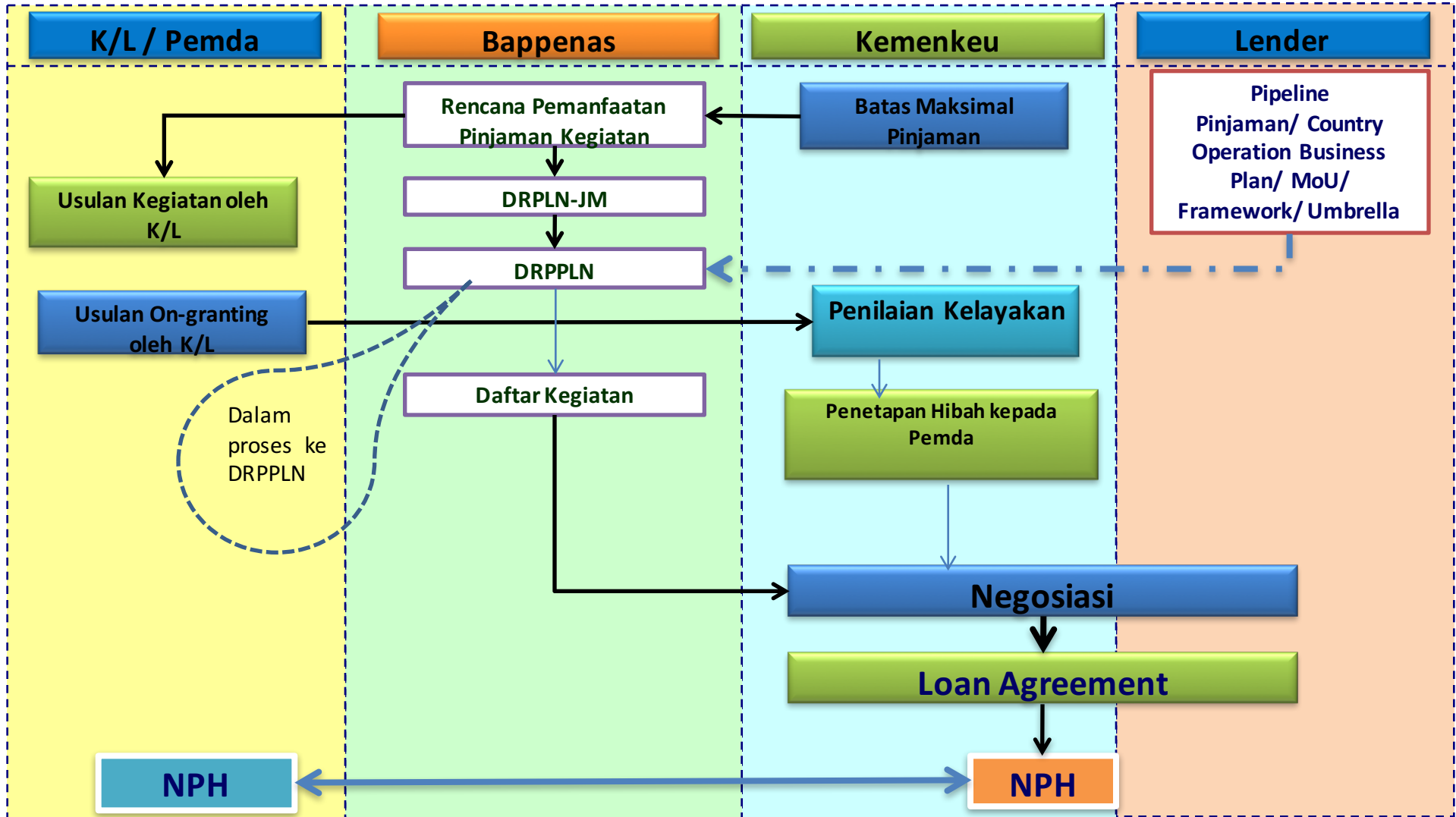
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

- Melibatkan Kementerian PUPERA, Kemendagri, Kementan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Fund Channeling
 - Pusat - Kementerian PUPERA, Kemendagri, dan Kementan
 - Pemda - On-granting

- Total Pinjaman direncanakan sebesar USD 698,5 juta bersumber dari:
 - ADB sebesar USD 600,0 juta
 - IFAD sebesar USD 98,5 juta

Status IPDMIP dalam Dokumen Perencanaan



Status Penganggaran IPDMIP dalam RAPBN 2016

- Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian

No	Nama Lender	Nama Proyek Dalam NPPLN	RAPBN 2016 (milyar rupiah)
Kementerian Dalam Negeri			
Pipeline			-
1	ADB	Integrated Citarum Water Resources Management Phase II	-
Kementerian Pertanian			
Pipeline			1.00
1	ADB	Flood Management in Selected River Basin	1.00

Status Penganggaran IPDMIP dalam RAPBN 2016

▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nama Lender	Nama Proyek Dalam NPPLN	RAPBN 2016 (milyar rupiah)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
Pipeline			2,945.81
1	ADB	Flood Management in Selected River Basin	21.01
2	ADB	Regional Roads Development Project II	0.10
3	ADB	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project for Western and Eastern Indonesia Phase-1	8.00
4	KOREA	The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia	1.00
5	CHINA	Additional Works Jatigede (II)	531.00
6	CHINA	Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan- Toll Road Phase 2	363.70
7	CHINA	Toll Road Development of Solo - Kertosono	440.00
8	CHINA	Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	354.25
9	CHINA	Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung	220.00
10	ADB	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	-
11	Hungaria	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	144.00
12	SPANYOL	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SSWTP-ER Spanyol	173.45
13		PAMSIMAS 3	545.30
14	World Bank	National Slum Upgrading	85.00
15	IDB	National Slum Upgrading	59.00

Status Penganggaran IPDMIP dalam RAPBN 2016

- On-granting

No	Nama Lender	Nama Proyek Dalam NPPLN	RAPBN 2016 (milvar rupiah)
Kementerian Keuangan c.q. DJPK			2,404.33
On Going			2,404.33
1	JICA	ES for Jakarta Mass Rapid Transit Project (Pemprov DKI Jakarta)	-
2	JICA	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (I) (Pemrov DKI Jakarta)	1,082.66
3	World Bank	Water Resources and Irrigation Sector Management Program II (WISMP-2)	170.71
4	JICA	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Phase I Stage 2 (Pemprov DKI Jakarta)	1,150.96
Pipeline			

Critical Action yang perlu segera dilaksanakan

Action	By	Deadline	Status
Surat ke Kementan sbg Implementing Agency	DJSDA	21/09/2015	
Surat Kementan ke Kemenkeu untuk alokasi anggaran 2016	Kemtan	Oktober 2015	
Finalisasi Readiness Criteria	DJSDA	Minggu I Oktober 2015	

thank
you!